



Jurnal **Economia**

Kajian Ilmiah Ekonomi & Bisnis

Mengatasi Pengangguran di Indonesia

Upaya Mengatasi Pengangguran di Indonesia

Oleh: Sri Hermuningsih

Peran Kewirausahaan dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia

Oleh: Sukidjo

Pengangguran di Indonesia Permasalahan dan Strategi Mengatasinya

Oleh: Endang Mulyani

Keterkaitan Pengangguran dan Pendidikan: Potensi Sumber Daya dan Masalah

Oleh: Eko Giyartiningrum dan Aula Ahmad Hafidh

Peran Sektor Informal dalam Menanggulangi Masalah Pengangguran di Indonesia

Oleh: Daru Wahyuni

Pengembangan Agro Industri: Suatu Alternatif Pembangunan Pertanian Untuk Mengatasi Pengangguran

Oleh: Suwarno

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Upaya Mengatasi Pengangguran

Oleh: Teguh Sihono

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jurnal Economia	Vol. 1	No. 1	Hal. 1-85	Yogyakarta, Agustus 2005	ISSN 1858-2648
-----------------	--------	-------	-----------	-----------------------------	-------------------

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi -----	i	
Pengantar Redaksi -----	ii	
Daftar Isi -----	iii	
1. Upaya Mengatasi Pengangguran di Indonesia		
Oleh: Sri Hermuningsih -----	1-16	
2. Peran Kewirausahaan dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia		
Oleh: Sukidjo -----	17-28	✓
3. Pengangguran di Indonesia Permasalahan dan Strategi Mengatasinya		
Oleh: Endang Mulyani -----	29-40	✓
4. Keterkaitan Pengangguran dan Pendidikan: Potensi Sumber Daya dan Masalah		
Oleh: Eko Giyartiningrum dan Aula Ahmad Hafidh -----	41-53	✓
5. Peran Sektor Informal dalam Menanggulangi Masalah Pengangguran di Indonesia		
Oleh: Daru Wahyuni -----	54-64	✓
6. Pengembangan Agro Industri: Suatu Alternatif Pembangunan Pertanian Untuk Mengatasi Pengangguran		
Oleh: Suwarno -----	65-69	✓
7. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Upaya Mengatasi Pengangguran		
Oleh: Teguh Sihono -----	70-85	✓
Biodata Penulis		
Pedoman Penulisan		

PERAN SEKTOR INFORMAL DALAM MENANGGULANGI MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA

Oleh: Daru Wahyuni

(Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta)

Abstract

Unemployment has been the most crucial economic problem in Indonesia. The efforts to implement the strategic policy for economic development supporting the growth of formal sectors have failed to solve this problem. The mechanism of trickle down effect expected from this policy is futile. Therefore, most of manpower that is not accommodated in formal sectors shifts to work at small-scale industries in informal sectors. This effort has overcome unemployment temporarily. However, since the economic crisis stroke Indonesia, the rate of unemployment has been boosted. There are many workers or employees who get the impact of this economic crisis strike. Million of them have lost their jobs. They must leave the formal sectors and go into the informal ones. Once again informal sectors becomes safety belt for economic threat called unemployment.

Keywords : unemployment, informal sector, formal sector

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia mencapai 179 juta jiwa. Sepuluh tahun berikutnya jumlah tersebut telah meningkat menjadi 205 juta jiwa. Dengan demikian pertambahan jumlah penduduk selama dasawarsa ini mencapai sekitar 15% atau tumbuh dengan rata-rata 2% per tahun. Di satu sisi, jumlah penduduk yang besar diyakini merupakan modal dasar dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, namun di sisi lain, dengan pengelolaan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar sekaligus akan menimbulkan masalah

kependudukan yang sangat krusial terutama di bidang ketenagakerjaan.

Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi inipun, masih ditambah pula dengan struktur penduduk berusia muda pada dua sampai satu dasawarsa yang lalu. Bisa ditebak, dekade berikutnya Indonesia akan menghadapi ledakan angkatan kerja baru yang tentu saja membutuhkan lapangan kerja baru pula. Menggunakan kriteria Badan Pusat Statistik, pada tahun 2001 angkatan kerja Indonesia berjumlah 98,8 juta orang atau sekitar 68,8% dari seluruh penduduk Indonesia. Dari angka tersebut sebesar 8,01 juta jiwa (8,10%)

(menganggur). Lebih dari itu, menurut Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), bahkan pada tahun 1993 jumlah penganggur di Indonesia telah mencapai 11,35 juta orang dan didominasi oleh penganggur usia muda (Tempo Interaktif, 2004). Angka pengangguran di Indonesia sejak tahun 1997-2001 memang menunjukkan angka yang semakin meningkat. Jika pada tahun 1997 angka pengangguran, baru mencapai 4,68%; tahun 1998 mencapai 5,46%; tahun 1999 mencapai 6,36% dan tahun 2002 mencapai 6,08% (tidak termasuk provinsi Maluku), maka pada tahun 2001 telah mencapai angka 8,01% seperti tersebut di atas. Sebuah angka yang mencengangkan yang mestinya perlu segera diupayakan pemecahannya.

B. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia : Harapan dan Kenyataan

Menilik tingginya angka pengangguran di Indonesia, menjadi menarik untuk mempertanyakan kembali mengenai kebijakan apa yang telah dan alternatif kebijakan apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Sejarah rangkaian kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia, pada dasarnya memang dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat harga yang rendah dan stabil, distribusi pendapatan yang adil dan tentu saja

tingkat kesempatan kerja yang tinggi (Ace Partadiredja, 1993 : 17). Sayang sekali pada era pemerintahan Soekarno yang kental dengan ekonomi terpimpinnya (Hill, 1996 : 2), perekonomian Indonesia justru dilanda *hyperinflation* yang membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Kebijakan *sanering* mata uang rupiah menjadi puncak penderitaan rakyat hingga menimbulkan gelombang protes keras yang memicu runtuhnya kepemimpinan Presiden Soekarno. Setelah rezim Soekarno jatuh, muncul rezim yang berlabel "Orde Baru". Selama orde ini, Indonesia dibawa pada pembangunan ekonomi yang cenderung berorientasi kapitalisme. Para pengambil keputusan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia, mempraktekkan mentah-mentah teori-teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terbukti sukses di negara asalnya, untuk menetapkan kebijakan yang mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia.

Paradigma Rostow mengenai 5 tahap pembangunan ekonomi, diadopsi pemerintah Indonesia melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dan Program Pembangunan Jangka Panjang (PJP). Dengan program ini pemerintah berharap tujuan pembangunan ekonomi Indonesia akan tercapai melalui setiap langkah tahapan yang terlampaui. Akan tetapi gaung bahwa Indonesia akan segera mencapai era lepas landas yang sempat nyaring dikemukakan pemerintah pada tahun 90-an tidak juga segera terbukti.

Dewasa ini bahkan "lagu merdu" tersebut tidak pernah terdengar lagi.

Sementara itu semangat mendorong investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diadopsi dari model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Menurut teori ini penanaman investasi, sebelumnya harus didahului dengan penggalangan dana yang berasal dari tabungan domestik. Kenyataan di Indonesia, jumlah tabungan dalam negeri yang mencukupi untuk mendukung upaya investasi ternyata sulit terpenuhi. Masalah *saving-investment gap* ini selanjutnya dipecahkan pemerintah Indonesia dengan cara membuka lebar-lebar keran aliran modal asing ke Indonesia, baik berupa *Foreign Direct Investment*, bantuan luar negeri dan utang luar negeri. Pada gilirannya, kebijakan ini ternyata memang mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh dengan angka yang mencengangkan. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai, diharapkan akan mengimbis secara positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sayangnya mekanisme *trickle down effect* yang diharapkan, tidak juga kunjung datang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi ternyata tidak disertai dengan pemerataan di segala bidang, khususnya pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena sektor formal modern yang merupakan sasaran kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia ternyata tidak mampu muncul sebagai

penyedia lapangan kerja baru bagi angkatan kerja baru karena meskipun memiliki margin keuntungan yang besar, tetapi kurang mampu menyerap tenaga kerja akibat sifat produksinya yang lebih *capital intensive*. Kebijakan pemerintah yang cenderung bias ke arah perusahaan-perusahaan besar di sektor modern ini menjadi seolah-olah tidak berarti. Apa artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi bila tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

Saat badai krisis ekonomi melanda Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang pernah dicapai menjadi seolah-olah semakin tidak berarti lagi. Perusahaan-perusahaan besar yang semula dianggap sebagai lokomotif penggerak perekonomian Indonesia satu demi satu runtuh. Kegiatan produksi yang ditopang oleh penanaman modal asing dan utang luar negeri, memunculkan ekonomi biaya tinggi karena melemahnya nilai tukar Rupiah sampai titik yang paling rendah. Jumlah penganggur di Indonesia semakin besar karena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis yang melanda Indonesia menjadi tidak bisa dielakkan. Akibatnya, ketika sektor formal tidak lagi bisa diandalkan oleh para tenaga kerja Indonesia, maka sektor informal menjadi "pelarian" paling mudah untuk pemecahannya. Barangkali sektor ini memang tidaklah memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya karena hidup di sektor informal hanyalah hidup secara subsisten (Chatib M.

Basri, 2002). Meskipun demikian, sepanjang sektor formal-modern tetap belum mampu mengatasi rendahnya kesempatan kerja maka tidak ada solusi lain yang lebih mudah selain dari mencoba mengadu nasib di sektor informal. Sektor informal yang sejak dahulu telah menjadi alternatif pilihan pekerjaan bagi banyak angkatan kerja Indonesia, ketika lokomotif sektor formal tidak mampu mengangkut mereka, semakin diandalkan oleh anggota barisan penganggur, termasuk penganggur baru akibat PHK sebagai pilihan lapangan kerja satu-satunya yang bisa mereka harapkan.

C. Konsep Dualistik : Sektor Formal dan Informal.

Menggagas konsep dualistik, tidak bisa tidak, perlu kembali menelaah masalah

dualisme ekonomi di Indonesia yang dikemukakan oleh Boeke. Menurut Boeke (1982: 2) masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa sebelum Perang Dunia I, terbagi dua menjadi masyarakat kapitalis dan masyarakat pre-kapitalis. Masyarakat kapitalis yang maju hidup berdampingan dengan masyarakat pre-kapitalis yang tertinggal (*underdeveloped*). Karena ciri khas masing-masing kelompok, sekat yang memisahkan keduanya tetap nyata, meskipun kehidupan kedua kelompok ini terus berjalan bersama-sama. Terminologi dualistik ala Boeke, tampaknya masih bisa berlaku untuk memahami paradoks modernisasi di Indonesia. Modernisasi yang identik dengan kemajuan, pada kenyataannya masih meninggalkan sisa-sisa ketradisional. Tidak kurang kebijakan pembangunan

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Usaha Sektor Formal dan Informal

Karakteristik	Sektor Formal	Sektor Informal
Modal	Relatif mudah diperoleh	Sukar diperoleh
Teknologi	Padat modal	Padat karya
Organisasi	birokrasi	Mempunyai organisasi keluarga
Kredit	Dari lembaga keuangan resmi	Dari lembaga keuangan tidak resmi
Serikat buruh	Sangat berperan	Tidak berperan
Bantuan pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha	Tidak ada
Hubungan dengan desa	<i>One way traffic</i> untuk kepentingan sektor formal	Saling menguntungkan
Sifat wiraswasta	Sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau import	Berdiri di atas kaki sendiri
Persediaan barang	Jumlah besar dan berkualitas baik	Jumlah kecil dan kualitas berubah
Hubungan kerja majikan	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan asas saling kepercayaan

ekonomi Indonesia yang bias ke arah sektor formal modern sekalipun, tidak mengurangi kelenturan sektor informal menghadapi setiap masalah bahkan saat krisis melanda Indonesia, sehingga keberadaannya tetap diakui tanpa bisa dibantah. Sektor informal dengan nuansa ke-tradisional-annya mampu hidup berdampingan dengan sektor formal dengan nuansa ke-modern-annya. Meskipun keduanya tidak benar-benar bisa dipisahkan, tetapi kata formal di satu sisi dan informal di sisi yang lain telah menegaskan adanya dua entitas yang hidup berdampingan.

Bicara mengenai dua entitas yang hidup berdampingan ini, rasanya perlu dibicarakan kembali apa perbedaan di antara keduanya sehingga sekat yang memisahkan dua kelompok ini masih tetap tampak nyata. Dengan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Hidayat (1978: 427) perbandingan antara karakteristik kegiatan usaha di sektor formal dan informal dapat dilihat pada Tabel 1.

Melihat perbandingan karakteristik sektor formal dan informal seperti tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa sektor informal dengan segala kesederhanaannya, pada masa sulit dalam beberapa tahun terakhir ini telah mampu menjadi katup pengaman perekonomian Indonesia. Mereka yang gagal mendapatkan pekerjaan di sektor formal akan memiliki peluang kerja yang relatif besar di sektor informal, karena sektor ini memang relatif lebih mudah dijangkau dibanding sektor formal.

D. Peluang Kesempatan Kerja di Sektor Informal di Indonesia.

Beberapa penelitian mengenai sektor informal, menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja di sektor ini cukup signifikan. Bahkan di beberapa negara, daya serap sektor informal justru melebihi sektor formal. Menurut Hernando de Soto, di ibukota Peru, misalnya, ditemukan paling tidak 60% penduduknya bekerja di sektor ini (Dikutip oleh Arief Rahman Hakim, 2004: 22). Sementara itu penelitian yang dilakukan ILO di kota-kota besar di Asia menemukan bahwa lebih dari 50% angkatan kerja kota menggantungkan hidupnya pada sektor informal. Hal serupa terjadi pula di Indonesia. Di kota-kota besar di Indonesia daya serap sektor ini rata-rata mencapai 40% dari angkatan kerja yang ada. Tingginya daya serap tenaga kerja di sektor informal selain karena banyaknya pekerja yang menginginkan (baik secara sukarela maupun terpaksa) masuk ke sektor informal, juga karena karakteristik sektor itu sendiri. Para pekerja sektor informal pada umumnya tidak perlu memenuhi tuntutan tertentu terkait dengan tingkat pendidikan atau keahlian mereka seperti halnya di sektor formal. Secara lengkap daya serap tenaga kerja sektor informal di beberapa kota besar di Indonesia dapat dicermati pada Tabel 2.

Unit-unit usaha sektor informal di kota-kota besar pada umumnya terkonsentrasi di sektor perdagangan dan sektor pelayanan jasa bagi masyarakat kota. Kegiatan yang mereka lakukan, mulai dari menjadi pedagang asongan, pedagang kaki lima,

Tabel 2. Proporsi Pekerja Sektor Informal di Beberapa Kota Besar di Indonesia

Kota	Jumlah Pekerja Sektor Informal (dalam %)
Jakarta	37,1
Surabaya	34,9
Semarang	35,7
Bandung	31,9
Yogyakarta	43,4
Surakarta	40,9
Palembang	55,6
Medan	41,2
Ujung Pandang	45,1
Bandar Lampung	48,2
Padang	43,7
Samarinda	52,3
Manado	40,3

Sumber : SUSENAS 1993

tukang parkir, tukang becak sampai buruh gendongan bersifat melengkapi kegiatan sektor formal. Unit usaha kecil pekerja sektor informal di kota, bagaimanapun tidak bisa diingkari telah turut serta meramalkan dinamika kehidupan masyarakat kota. Sebagai contoh, apabila jam makan siang tiba, maka akan tampak pegawai-pegawai perlehte yang berjalan keluar dari kantornya yang megah untuk sekedar menikmati makan siang mereka di warung-warung makan kecil di sekitar tempatnya bekerja. Para pegawai dari sektor formal akan mendapatkan makanan dengan harga yang relatif murah, sedangkan penjual yang berasal dari sektor informal akan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sungguh sebuah sinergi yang manis, dan tentu saja masih banyak sinergi-sinergi lainnya yang dapat dijumpai dalam konteks interaksi antara sektor formal dan informal di kota-kota

besar semacam ini. Sayang sekali seringkali para pekerja sektor informal inilah yang pertama kali harus terpinggirkan manakala kota merasa perlu berbenah diri atas nama modernisasi.

Seperti telah dikemukakan di atas, sektor informal telah mampu menjadi katup pengaman saat perekonomian nasional dilanda krisis. Angkatan kerja yang belum juga tertampung di sektor formal ditambah penganggur-penganggur baru korban PHK, sebagian besar memilih menggantungkan kehidupannya di sektor informal. Bukan hanya mereka yang tergusur, para pekerja kelas menengah dan bahkan kaum *selebritis* pun tidak segan-segan mengadu nasib dengan membuka bisnis atau usaha yang dapat digolongkan ke dalam sektor informal. Akibat krisis, sektor informal tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Fenomena kafe tenda seperti yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya beberapa saat setelah krisis serta munculnya banyak

pasar atau warung PHK di kota-kota lain karena para pelaku atau pemiliknya merupakan korban-korban pemutusan hubungan kerja, semakin menegaskan eksistensi sektor informal di masa krisis tersebut.

Catatan Badan Pusat Statistik juga menegaskan hal serupa. Jumlah pekerja di sektor informal pada tahun 1998 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dicermati dari Tabel 3.

informal yang mampu menyerap tenaga kerja baik sebelum krisis maupun setelah krisis paling tidak telah berhasil mencegah terjadinya ancaman ekonomi makro berupa pengangguran. Dengan demikian tidak terlalu berlebihan apabila sektor informal sering disebut sebagai penyelamat (*safety belt*) bagi perekonomian nasional. Mengingat perannya yang relatif penting ini, maka perlu diupayakan satu kebijakan yang lebih mampu menyentuh kepentingan sektor ini.

Tabel 3. Pekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 1997 dan 1998

Status Pekerjaan	1997 (%)	1998 (%)
Formal	35,4	31,7
Informal	64,6	68,3
Total %	100	100
N (Juta)	82,5	68,3

Sumber : Susenas 1997 dan 1998

Dari tabel di atas tampak bahwa proporsi pekerja yang memasuki sektor informal meningkat dari sekitar 65 % pada tahun 1997 (mulai krisis) dan menjadi sekitar 69 % pada tahun 1998 (selama krisis berlangsung). Sementara itu, pangsa sektor informal dalam kesempatan kerja dapat dilihat pada Tabel 4.

Pergeseran tenaga kerja dari sektor formal menuju sektor informal, barangkali bisa digunakan untuk mengindikasikan telah terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak sedikit pula di antara pekerja sektor informal yang cukup sukses dalam menekuni usahanya. Meskipun demikian keberadaan sektor

E. Upaya pemberdayaan Sektor

Informal: Sebuah Catatan Akhir

Selama ini, kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung lebih berpihak kepada perusahaan-perusahaan besar di sektor modern. Masih sedikit upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendukung kepentingan unit-unit usaha kecil di sektor informal. Padahal sektor ini terbukti memiliki daya tahan (*endurance*) yang luar biasa dalam menghadapi kondisi perekonomian seperti apapun, bahkan pada saat kritis multidimensional yang parah sedang menimpa Indonesia. Sumber daya ekonomi

Tabel 4. Pangsa Pekerjaan di Sektor Informal

	1997	1998
Laki-laki	62,8	65,4
Perempuan	53,3	61,6
Perkotaan	70,2	71,5
Pedesaan	42,8	45,7
Total	73,3	75,8

Sumber : SAKERNAS 1998

yang ala kadarnya dan sedikit sekali menerima fasilitas dari pemerintah (bahkan seringkali tempat kegiatan usahanya dirazia, dibongkar dan digusur) justeru membentuk sektor informal tumbuh menjadi sub ekonomi yang tangguh dan tahan banting. Unit-unit usaha sektor informal yang tidak tergantung pada modal luar negeri, membuat sektor ini tidak perlu dipusingkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah, termasuk saat nilai tukar rupiah turun sampai titik yang sangat rendah. Tak heran bila sektor informal (termasuk unit usaha kecil dan menengah) hampir tidak terusik saat krisis ekonomi melanda Indonesia.

Dengan sekadar memperhatikan rasional-rasional ekonomis, barangkali bisa diterima apabila sektor informal cenderung dianaktirikan oleh pemerintah dibandingkan sektor formal. Barang dan jasa produksi sektor informal dan rumah tangga pada umumnya tidak didistribusikan melalui pasar (*underground economies*). Tentu saja, karena tidak melalui pasar, maka aktivitas-aktivitas pelaku sektor informal tidak akan tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Belum lagi dilihat dari *value added* yang

dihasilkan. Unit-unit usaha kecil sektor informal, meskipun umumnya padat tenaga kerja, namun memberikan nilai tambah ekonomi yang kecil. Berbeda dengan di sektor formal yang padat modal, perusahaan-perusahaan besar pada umumnya juga memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar. Dengan demikian, menggunakan penghitungan model apapun, sektor formal akan memberikan kontribusi yang besar pada PDB. Kecilnya atau bahkan ketertidakukuran kontribusi sektor informal dalam membentuk PDB inilah yang membuat sektor informal sering dipandang sebelah mata. Selain itu, karena nilai tambah sektor informal jauh lebih kecil dibanding nilai tambah sektor formal, maka dilihat dari kemampuannya membayar pajak yang merupakan salah satu sumber penghasilan negara, juga tentu jauh lebih kecil dibandingkan kemampuan sektor formal. Hal inilah yang membuat sektor formal cenderung "dimanjakan" oleh pemerintah.

Sekadar dari alasan ekonomis, tampaknya memang tidak ada gunanya membina sektor informal yang pertumbuhan skala usahanya relatif sangat lambat.

Namun tentu tidak bijaksana bila sekadar dari alasan tersebut, kemudian pemerintah mengabaikan kepentingan sektor informal mengingat sektor ini merupakan tempat bergantung sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang rata-rata kondisi sosial ekonominya masih lemah dan belum berdaya.

Pemerintah memang masih belum optimal membina sektor informal. Hal ini diakui sendiri oleh Jusuf Kalla yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra). Lebih lanjut bahkan beliau menyatakan bahwa kalau pemerintah telah optimal membangun sektor informal tentu Indonesia telah menjadi negara yang makmur dan merata (Balairung, 2004 : 73). Namun pemerintah terus berupaya meningkatkan kepedulian terhadap sektor informal. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya kementerian yang khusus menangani masalah usaha kecil dan menengah.

Upaya memberdayakan sektor informal digariskan pemerintah berdasarkan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan negara Tahun 1999 dan Rencana Strategis Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM, 2000 : 33). Strategi kebijakan pemberdayaan UKM meliputi 1) Strategi kebijakan sistem ekonomi kerakyatan, 2) Strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif, dan 3) Strategi kebijakan dukungan penguatan bagi koperasi dan UKM. Komitmen pemerintah untuk

meningkatkan kepedulian terhadap sektor informal tentu saja sangat melegakan. Namun upaya pemberdayaan sektor ini, perlu dituangkan dalam langkah-langkah nyata yang operasional. Jangan sampai pemerintah terjebak pada rencana strategi pemberdayaan yang tersusun rapi dan ideal, tetapi sesungguhnya hanya sekedar retorika semata. Dengan demikian niat baik pemerintah merangkul dan memberdayakan sektor informal melalui kebijakan yang dilakukan benar-benar mampu menjangkau (baca: dijangkau) pelaku-pelaku sektor informal.

F. Kesimpulan

Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi merupakan masalah klasik yang dihadapi Indonesia. Masalah kependudukan ini pada gilirannya menimbulkan masalah lain di sektor ketenagakerjaan. Pengangguran dengan angka yang relatif semakin tinggi dari tahun ke tahun membutuhkan upaya pemecahan yang tidak sederhana.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Indonesia ternyata tidak mampu berbuat banyak. Kebijakan yang bias kepada perusahaan-perusahaan besar yang cenderung bersifat padat modal, memang mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh dengan angka yang menggembirakan, namun mekanisme *trickle down effect* dari kebijakan tersebut ternyata tidak segera muncul seperti yang diharapkan. Perusahaan-perusahaan besar sebagai lokomotif perekonomian nasional

tidak mampu menampung angkatan kerja Indonesia yang ada. Antara para tenaga kerja itu sendiri harus saling bersaing ketat, untuk bisa masuk ke sektor formal, karena sektor ini menuntut kualifikasi tertentu terkait dengan kualitas pendidikan dan keahlian tenaga kerja yang akan digunakannya. Tentu kemudian ada yang harus tersisih. Mereka yang tersisih ini, akan masuk ke sektor yang bisa mereka jangkau yaitu sektor informal.

Sektor informal di Indonesia sejak lama telah menjadi tumpuan harapan banyak pekerja. Mereka memilih (baik dengan sukarela maupun terpaksa) masuk ke sektor informal karena karakteristik sektor ini relatif lebih sederhana. Para pekerja sektor informal tidak pernah dituntut harus memiliki tingkat pendidikan dan keahlian tertentu, asalkan mereka memiliki semangat dan ketekunan yang cukup besar untuk menjalankan usahanya yang umumnya

berskala kecil. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki dan minimnya bantuan pemerintah yang bisa mereka akses, sektor informal justru tumbuh menjadi sub kegiatan ekonomi yang tangguh dan tahan banting. Hal ini terbukti bahwa pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, sektor ini nyaris tidak terpengaruh efek negatif krisis tersebut. Mereka tetap eksis bahkan semakin bertambah besar akibat masuknya korban-korban PHK sektor formal yang di luar skenario justru terpuruk akibat krisis.

Baik sebelum krisis dan setelah krisis, sektor informal terbukti mampu menjadi *safety belt* bagi ancaman ekonomi makro berupa tingkat pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu untuk memberdayakan sektor ini agar keberadaannya menjadi lebih berarti, uluran tangan pemerintah diperlukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat nyata dan operasional.

Daftar Pustaka

- Arief Rahman Hakim. (2004). "Meninjau Ulang Aspek Humanisme dalam Teori Ekonomi".. Yogyakarta : Majalah *Balairung* Edisi 37. Tahun XVIII.
- Chatib M. Basri. (2002). "Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita" Jakarta : *Kompas*, 25 November 2002.
- Didik J. Rachbini. (1991). "Dimensi Ekonomi dan Politik pada Sektor Informal". Jakarta: *Prisma* Nomor 3. 1991
- Hidayat. (1978). *Pengembangan Sektor Informal dalam Pengembangan Nasional : Masalah dan Prospek*. Bandung : Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Kantor Menegkop dan UKM. (2000). *Rencana Strategi Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*. Jakarta : Kantor Menegkop dan UKM.

- Hidayat. (1978). *Pengembangan Sektor Informal dalam Pengembangan Nasional : Masalah dan Prospek*. Bandung : Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Kantor Menegkop dan UKM. (2000). *Rencana Strategi Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*. Jakarta : Kantor Menegkop dan UKM.
- Mubyarto (2004). *Ilmu Ekonomi yang Kita Ajarkan Keliru*. Yogyakarta : Majalah "Balairung" Edisi 37. Tahun XVIII.
- Piet Fitriadi. (2004). "Mencari Rakyat dalam Ekonomi Kita : Sebuah Upaya mendobrak Adagium "Size Does Matter"" Yogyakarta : Majalah *Balairung* Edisi 37. Tahun XVIII.
- Sethuraman, S.V. (1981). *The Urban Informal Sector in Developing Countries : Employment, Poverty and Enviroment*. Geneva : International Labor Office.
- Baitur Pustaka
Aval Kajian Hakim (2004) "Meningkatkan Aspek Humanitas dalam ..."
Yogyakarta : Majalah *Balairung* Edisi 37 Tahun XVIII
Chab M. Bam (2002) "Wajah Mungil Koperasi dan ..."
November 2002
Dikri J. Sachdev (1991) "Global Ekonomi dan Kebijakan ..."
Jember
Hidayat (1978) "Pengembangan Sektor Informal dalam Pengembangan Nasional : Masalah dan Prospek"
Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia
Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran
Kantor Menegkop dan UKM (2000) "Rencana Strategi Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah"
Jakarta : Kantor Menegkop dan UKM